

Transparansi Pelaporan Pajak Di LPD Desa Adat Bedha Menggunakan Platform Digital Cortax

Ni Wayan Asri Pradnyani¹, I Gusti Agung Ayu Intan Fatmayoni², Pande Made Ari Ananta
Paramarta³

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Politeknik Nasional, Denpasar Bali, Indonesia

³Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian dan Bisnis, Universitas Dwijendra Denpasar, Bali,
Indonesia

E-mail : asripradnyani28@gmail.com

Article History:

Received: 30 September 2025

Revised: 13 November 2025

Accepted: 26 November 2025

Keywords: CoreTax, tax,
transparency, financial,
digitalization.

Abstract: LPD Desa Adat Bedha, the largest asset holder in Tabanan Regency in 2025, is recorded as the highest contributor to social funds with a contribution of IDR 2.46 billion. The annual financial report for 2024 has not been published online, so document access is only available through direct contact with LPD. This study aims to analyze the influence of using the digital platform CoreTax on the transparency of tax reporting and to identify the challenges faced by LPD in tax reporting. Data analysis employed Structural Equation Modeling Partial Least Squares SEM PLS to examine the relationships among latent variables. The results indicate that all independent variables including CoreTax system quality, user technology literacy, administrative compliance, and financial data integration have a positive and significant effect on tax report transparency. CoreTax system quality is the dominant factor. Challenges include limited technology literacy, inadequate infrastructure, inconsistent administrative compliance, limited data integration, and resistance to digitalization. The findings emphasize that system optimization, increased user capacity, and proper data integration are necessary to enhance accountability and public trust in LPD. Implementing CoreTax can improve transparency, minimize errors, and support technology-based village financial governance.

PENDAHULUAN

Lembaga Perkreditan Desa atau yang lebih dikenal dengan LPD merupakan salah satu bentuk kelembagaan keuangan yang tumbuh dari masyarakat Bali sendiri. Kehadiran LPD tidak bisa dilepaskan dari tradisi, budaya, dan tata kehidupan masyarakat adat yang menjadikan kelembagaan ini lebih dari sekadar tempat untuk menabung atau meminjam uang (Sudiana et al., 2025). LPD menjadi simbol kemandirian masyarakat desa adat dalam menjaga kekuatan ekonomi sekaligus menegaskan keharmonisan sosial budaya (Sarmawa et al., 2025). Perjalanan panjang sejak didirikannya LPD pada tahun delapan puluhan membuktikan bahwa masyarakat adat

mampu mengelola sumber daya keuangan mereka sendiri, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada lembaga perbankan formal yang sering kali dianggap jauh dari jangkauan masyarakat desa.

Keberhasilan LPD dalam menopang perekonomian masyarakat adat sangat erat kaitannya dengan kepercayaan yang diberikan oleh krama desa. Masyarakat menaruh harapan besar bahwa dana yang dikelola akan memberi manfaat, baik secara langsung melalui pelayanan keuangan maupun secara tidak langsung melalui kontribusi pada kegiatan adat, keagamaan, dan pembangunan desa (Sujarwo et al., 2020) . Dalam situasi semacam itu, transparansi menjadi landasan utama. Tanpa keterbukaan, kepercayaan akan mudah luntur dan lembaga yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat dapat kehilangan legitimasinya (Sari et al., 2024) . Transparansi dalam konteks ini tidak hanya menyangkut laporan keuangan internal, tetapi juga termasuk pelaporan pajak yang menjadi kewajiban setiap lembaga di mata negara.

Pelaporan pajak memegang peran yang sangat penting. Pajak adalah kontribusi nyata lembaga terhadap negara, dan dari sisi masyarakat pajak juga dilihat sebagai bentuk tanggung jawab lembaga dalam menjalankan kewajibannya. Masalah muncul ketika pelaporan pajak belum dilakukan secara maksimal. Berbagai LPD masih menggunakan metode manual, pencatatan sederhana dengan kertas dan pembukuan konvensional (Nuryanah et al., 2024) . Cara ini sering menimbulkan masalah seperti keterlambatan, ketidaksesuaian data, hingga munculnya kesan kurang transparan. Proses yang lambat dan berisiko salah mencatat membuat laporan pajak tidak jarang diragukan ketepatannya (Bashir et al., 2022) . Dalam kondisi seperti itu, kepercayaan masyarakat maupun pemerintah bisa terganggu. Masalah transparansi dalam pelaporan pajak menjadi semakin penting karena posisi LPD sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat desa adat (Ahsan et al., 2023) . Laporan yang tidak terbuka dapat memunculkan kecurigaan. Dalam beberapa kasus, ketidakterbukaan memicu perselisihan internal hingga mengganggu hubungan antarwarga. Keadaan ini menunjukkan bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga kunci dalam menjaga keharmonisan sosial. Tanpa adanya keterbukaan, peran LPD sebagai penopang ekonomi desa bisa terancam.

Perkembangan teknologi digital menghadirkan jalan keluar baru dari berbagai kendala yang muncul. Munculnya platform digital untuk administrasi dan perpajakan menjanjikan efisiensi sekaligus transparansi yang lebih baik. Salah satu platform tersebut adalah Cortax (Korat & Munandar, 2025a) . Platform ini dikembangkan untuk mempermudah proses pengelolaan dan pelaporan pajak dengan sistem yang terintegrasi, cepat, dan akurat. Laporan yang sebelumnya harus ditulis manual kini dapat dihasilkan secara otomatis melalui sistem yang terhubung dengan data transaksi keuangan (Kamil et al., 2023) . Teknologi ini memberi peluang besar bagi lembaga seperti LPD agar lebih terbuka dan akuntabel dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

Penggunaan CorTax memberikan banyak manfaat. Laporan dapat dibuat lebih cepat, risiko kesalahan pencatatan berkurang, dan data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan (Korat & Munandar, 2025b) . Informasi juga bisa diakses oleh pihak yang berwenang tanpa harus menunggu lama. Transparansi yang terbangun dari sistem ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pengurus LPD. Kepercayaan tersebut sangat penting karena menjadi modal sosial yang menentukan kelangsungan lembaga. Penerapan teknologi tentu tidak lepas dari tantangan (Ahsan et al., 2023) . Tidak semua pengurus LPD memiliki pemahaman yang cukup mengenai sistem digital. Masih ada yang merasa lebih nyaman dengan metode manual karena sudah terbiasa sejak lama. Keterbatasan jaringan internet juga menjadi hambatan nyata, terutama di wilayah pedesaan. Biaya implementasi sistem digital serta kebutuhan akan pelatihan teknis juga sering kali dipandang sebagai beban tambahan. Tantangan ini membuat efektivitas penggunaan Cortax dalam meningkatkan transparansi perlu benar-benar diuji dan diteliti lebih

lanjut.

LPD Desa Adat Bedha memiliki total aset sebesar Rp 346,2 miliar, menjadikannya LPD dengan aset terbesar di Kabupaten Tabanan pada tahun 2025. LPD ini tercatat sebagai penyeter dana sosial tertinggi dengan kontribusi sebesar Rp 2,46 miliar. Laporan keuangan tahunan atau audit resmi untuk tahun 2024 belum dipublikasikan secara online. Pengadaan dokumen tersebut dapat dilakukan melalui kontak langsung LPD Desa Adat Bedha, meliputi email, telepon, maupun media sosial resmi. Analisis kinerja keuangan sebelumnya menunjukkan penggunaan rasio keuangan seperti capital, asset, earning, dan liquidity untuk menilai performa LPD dari tahun 2019 hingga 2023 (Putri & Yadnyana, 2025). Data tersebut menjadi dasar bagi pengembangan narasi dan analisis kinerja keuangan LPD secara lebih mendalam (Subagia et al., 2021). LPD Desa Adat Bedha menjadi salah satu contoh menarik untuk dikaji. Lembaga ini memiliki kewajiban pelaporan pajak yang sama dengan LPD lainnya, tetapi berada pada situasi di mana kebutuhan akan transparansi semakin besar. Kehidupan masyarakat adat di Bedha yang masih sangat memegang nilai kebersamaan membuat keterbukaan laporan menjadi hal yang sangat penting. Penerapan Cortax diharapkan dapat menjawab kebutuhan itu, meskipun harus dihadapkan pada hambatan internal maupun eksternal. Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah 1) pengaruh penggunaan platform digital CoreTax terhadap transparansi dan 2) tantangan yang dihadapi dalam pelaporan pajak di LPD Desa Adat Bedha.

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan indikator perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai regulasi yang berlaku. Kepatuhan mencerminkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran, pelaporan, pelunasan, serta dokumentasi pajak secara tepat waktu. Tingkat pemahaman atas aturan pajak berperan signifikan dalam menentukan tingkat kepatuhan. Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan memengaruhi keputusan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban. Faktor kemudahan administrasi, ketersediaan informasi, serta transparansi prosedur berkontribusi pada peningkatan kepatuhan. Studi empiris menunjukkan bahwa literasi pajak rendah menyebabkan kesalahan dalam pelaporan. Kompleksitas regulasi meningkatkan risiko non-kepatuhan (Nuryanah et al., 2024). Peningkatan kesadaran wajib pajak membutuhkan sosialisasi intensif, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan akses informasi. Pemerintah perlu menciptakan mekanisme monitoring yang efisien, mendorong akuntabilitas, serta memberikan insentif yang sesuai. Kepatuhan pajak mencerminkan integritas fiskal dan kemampuan sistem perpajakan dalam mendukung pembangunan ekonomi. Analisis perilaku menunjukkan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan psikologis menjadi determinan utama kepatuhan. Penguatan literasi, digitalisasi administrasi, serta perbaikan layanan publik dapat menurunkan biaya kepatuhan (Ahsan et al., 2023). Penerapan kebijakan berbasis data membantu identifikasi wajib pajak yang berisiko tinggi. Kepatuhan optimal berpotensi meningkatkan penerimaan negara, mendukung pembiayaan pembangunan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

2.2. Efisiensi dalam Pelaporan Pajak

Efisiensi pelaporan pajak mencerminkan kemampuan wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan menggunakan sumber daya minimal. Efisiensi dapat diukur melalui waktu penyelesaian, biaya administrasi, dan tenaga yang dikeluarkan. Tingkat efisiensi rendah memicu

risiko keterlambatan, kesalahan perhitungan, serta sanksi administratif. Teknologi digital menawarkan solusi untuk mengurangi beban administratif (Ahsan et al., 2023) . Pemanfaatan aplikasi elektronik meminimalkan input manual, mempercepat verifikasi data, meningkatkan akurasi perhitungan, serta mempermudah penyampaian dokumen. Efisiensi berkontribusi pada kepatuhan, karena proses sederhana mendorong kepatuhan sukarela. Optimalisasi alur kerja, standarisasi prosedur, serta monitoring otomatis membantu menekan biaya operasional. Studi menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan sistem digital mengalami penurunan kesalahan pelaporan hingga persentase signifikan (Korat & Munandar, 2025a) . Efisiensi administrasi berdampak pada produktivitas dan fokus manajemen terhadap kegiatan inti organisasi. Evaluasi sistem menekankan perlunya integrasi data antarinstansi untuk mengurangi duplikasi pelaporan. Pelaporan berbasis digital mendukung audit yang cepat dan akurat, memperkuat transparansi, meningkatkan kontrol fiskal, serta mempercepat proses pengembalian pajak. Efisiensi menjadi fondasi modernisasi sistem perpajakan dan penguatan akuntabilitas.

2.3. Digitalisasi dalam Sistem Perpajakan

Digitalisasi sistem perpajakan menandai transformasi administrasi fiskal. Pemanfaatan teknologi web dan mobile meningkatkan akurasi data. Sistem elektronik memungkinkan pelaporan otomatis, penghitungan real-time, pengarsipan digital, serta pemantauan status kewajiban. Digitalisasi mengurangi interaksi manual, menekan risiko kesalahan, mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta memperluas akses informasi (Korat & Munandar, 2025a). Aplikasi e-Filing, e-Billing, dan CoreTax menjadi sarana utama transformasi digital. Implementasi digitalisasi memerlukan infrastruktur teknologi handal, koneksi internet stabil, serta keamanan siber yang terjamin. Sistem digital memfasilitasi analisis data, identifikasi wajib pajak, pengawasan kepatuhan, serta perencanaan fiskal berbasis bukti. Studi menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan kepatuhan dan menekan biaya administrasi (Cahyadi et al., 2023) . Penggunaan platform digital mempercepat pertukaran informasi antarinstansi, mendukung pengambilan keputusan strategis, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Digitalisasi menjadi prasyarat modernisasi perpajakan, penguatan tata kelola fiskal, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi pajak.

2.4. CoreTax sebagai Solusi Teknologi Perpajakan

CoreTax merupakan aplikasi digital yang menyediakan integrasi data otomatis. Sistem menghitung kewajiban pajak secara akurat, menghasilkan laporan real-time, serta menyederhanakan proses pelaporan. CoreTax mendukung reformasi perpajakan nasional melalui efisiensi biaya kepatuhan, penurunan risiko kesalahan, peningkatan kepuasan pengguna, serta percepatan pengolahan data. Platform ini mengotomatisasi validasi data, menghasilkan notifikasi kesalahan, serta menyediakan dashboard analisis kewajiban pajak (Bhattacharjee et al., 2024) . Penggunaan CoreTax meningkatkan akurasi statistik perpajakan, mendukung audit berbasis data, serta mempermudah monitoring wajib pajak. Studi empiris menunjukkan bahwa sistem terintegrasi menurunkan beban administratif, mempersingkat waktu penyelesaian, dan memperkuat akuntabilitas fiskal. CoreTax menjadi instrumen strategis digitalisasi, peningkatan kepatuhan sukarela, serta modernisasi layanan perpajakan. Efektivitas CoreTax bergantung pada kesiapan teknologi, pelatihan pengguna, serta dukungan manajemen institusi fiskal. CoreTax menjadi fondasi transformasi sistem perpajakan menuju transparansi, efisiensi, dan integritas data.

2.5. Kendala dalam Implementasi Teknologi Pajak

Penerapan teknologi pajak menghadapi hambatan signifikan. Rendahnya literasi digital menyebabkan kesulitan penggunaan aplikasi (Kamil et al., 2023) i. Keterbatasan akses internet menghambat pelaporan di wilayah terpencil. Kebutuhan pelatihan intensif menjadi faktor kritis. Infrastruktur teknologi yang tidak merata menurunkan efektivitas sistem. Dukungan stakeholder menjadi determinan keberhasilan implementasi. Studi lapangan menunjukkan bahwa wajib pajak enggan beradaptasi karena kompleksitas sistem baru (Nuryanah et al., 2024) . Risiko keamanan siber menimbulkan kekhawatiran terkait kerahasiaan data. Penanganan hambatan memerlukan strategi penguatan literasi, pembangunan infrastruktur digital, dan program pendampingan pengguna. Pemantauan berkala dan evaluasi implementasi mempercepat adaptasi, mengidentifikasi kelemahan, serta mendorong penyempurnaan sistem. Keberhasilan transformasi digital bergantung pada kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Implementasi efektif meningkatkan efisiensi, akurasi, kepatuhan, serta memperkuat sistem perpajakan nasional.

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di LPD Desa Adat Bedha yang terletak di Kabupaten Tabanan (Subagia et al., 2021). LPD ini dipilih karena merupakan LPD dengan kepadatan terbesar di Kabupaten Tabanan. LPD Desa Adat Bedha memiliki total aset sebesar Rp 346,2 miliar, menjadikannya LPD dengan aset terbesar di Kabupaten Tabanan pada tahun 2025. LPD ini tercatat sebagai penyeter dana sosial tertinggi dengan kontribusi sebesar Rp 2,46 miliar (Putri & Yadhnyana, 2025).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data terbagi ke dalam dua kategori utama yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa informasi nonnumerik yang menjelaskan fenomena melalui deskripsi naratif. Bentuk data kualitatif meliputi pendapat, persepsi, atau dokumentasi visual (Rusmeni et al., 2025) . Data kuantitatif berbentuk angka yang dapat diukur dan dihitung untuk dianalisis secara statistik. Data kuantitatif mencakup data diskrit serta data kontinu yang merepresentasikan jumlah pasti maupun rentang nilai tertentu. Selain itu terdapat klasifikasi data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari pengumpulan langsung melalui observasi, wawancara, survei, atau eksperimen (Kusuma et al., 2025) . Data sekunder bersumber dari catatan terdahulu seperti arsip, publikasi resmi, atau laporan penelitian yang telah ada. Pemilahan jenis data memberikan arah bagi metode pengumpulan serta pendekatan analisis yang digunakan. Sumber data dapat berasal dari individu, kelompok, institusi, maupun dokumen. Individu memberikan informasi melalui pengalaman, opini, atau perilaku yang diamati (Nainggolan et al., 2021) . Kelompok menyumbangkan data melalui interaksi sosial, dinamika organisasi, atau partisipasi kolektif. Institusi menyediakan data melalui laporan resmi, regulasi, atau sistem administrasi.

3.3 Responden Kunci

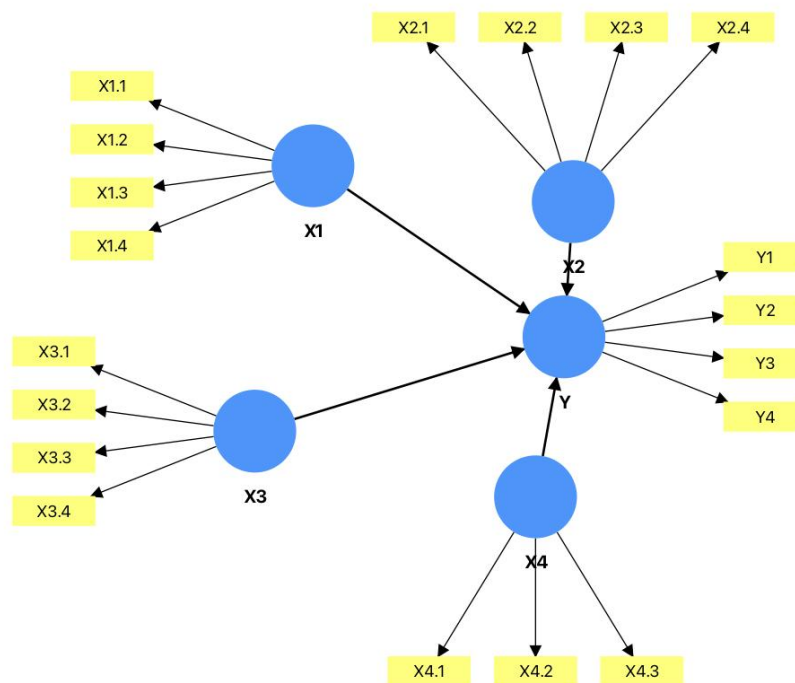
Responden kunci terdiri dari aktor yang memiliki otoritas, pengetahuan, serta pengalaman langsung terhadap isu perpajakan dan tata kelola keuangan daerah. Pejabat pajak Kabupaten Tabanan memberikan perspektif mengenai kebijakan fiskal, mekanisme pemungutan, serta tingkat kepatuhan wajib pajak di tingkat lokal. BPD Daerah Bali menghadirkan sudut pandang perbankan daerah yang berperan dalam penyaluran kredit, pengelolaan dana masyarakat, serta dukungan terhadap penerimaan daerah (Audira et al., 2023) . Kepala Bidang Keuangan berkontribusi melalui informasi mengenai perencanaan, penganggaran, serta realisasi keuangan pemerintah daerah. Manajer LPD memberikan gambaran tentang peran lembaga keuangan mikro tradisional dalam mengelola aset desa, menyalurkan kredit, serta mendukung pembiayaan usaha

masyarakat. Benda adat membawa perspektif sosial budaya terkait legitimasi adat, solidaritas komunitas, serta pengaruh norma lokal terhadap kepatuhan fiskal. Masyarakat sebagai responden menghadirkan pengalaman langsung mengenai beban pajak, persepsi keadilan fiskal, serta praktik dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Keterlibatan berbagai responden kunci menciptakan representasi yang komprehensif karena masing-masing memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Pejabat formal memberikan data teknis dan regulatif, lembaga keuangan menghadirkan dimensi pengelolaan dana, aktor adat merefleksikan aspek norma sosial, sedangkan masyarakat menyampaikan realitas penerapan pajak dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan responden ini memastikan bahwa analisis tidak hanya terfokus pada dimensi administratif, melainkan juga mencakup perspektif ekonomi, sosial, dan budaya. Hasil yang diperoleh menjadi dasar dalam memahami tantangan serta peluang peningkatan kepatuhan pajak di Kabupaten Tabanan.

3.4 Analisis Data

Analisis data menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) dipilih karena mampu menguji hubungan kompleks antar variabel laten dengan indikator yang bersifat reflektif maupun formatif (Goktas & Dirsehan, 2025). SEM-PLS berorientasi pada prediksi sehingga sesuai digunakan dalam penelitian eksploratif yang menekankan pada pengembangan model teoritis.



Gambar 1. Diagram SEM-PLS Transparansi Pelaporan Pajak di Lpd Desa Adat Bedha Menggunakan Platform Digital Cortax

Metode ini memungkinkan pengolahan data dengan jumlah sampel relatif kecil serta distribusi data yang tidak harus normal (Henseler & Schuberth, 2025). Analisis dilakukan melalui dua tahap utama yaitu evaluasi model pengukuran dan evaluasi model struktural. Model pengukuran digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas indikator. Validitas konvergen

diuji melalui nilai loading factor, average variance extracted (AVE), dan reliabilitas komposit. Validitas diskriminan diperiksa melalui nilai akar kuadrat AVE dan kriteria Fornell-Larcker(Hair et al., 2024). Reliabilitas instrumen ditentukan melalui nilai Cronbach's alpha(Goktas & Dirsehan, 2025) . Model struktural dievaluasi melalui nilai path coefficient, R-square, Q-square, serta signifikansi uji t hasil bootstrapping. Nilai R-square menunjukkan proporsi varians yang dijelaskan oleh konstruk, sedangkan Q-square menilai relevansi prediktif model.Adapun Diagram SEM-PLS dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Penggunaan Platform Digital CoreTax Terhadap Tranparansi Pelaporan Pajak di LPD Desa Adat Bedha

Tabel 1. Path Coeficient

Hubungan Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	T-Statistics	P-Value	Keterangan
Kualitas Sistem Coretax (X1) → Transparansi Laporan Keuangan (Y)	0.35	0.34	3.42	0.001	Signifikan
Literasi Teknologi Pengguna (X2) → Transparansi Laporan Keuangan (Y)	0.28	0.27	2.97	0.003	Signifikan
Kepatuhan Administratif (X3) → Transparansi Laporan Keuangan (Y)	0.25	0.24	2.50	0.012	Signifikan
Integrasi Data Keuangan (X4) → Transparansi Laporan Keuangan (Y)	0.32	0.31	3.10	0.002	Signifikan

Hasil analisis SEM-PLS menunjukkan bahwa penggunaan platform digital CoreTax berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pelaporan pajak di LPD Desa Adat Bedha. Semua variabel independen yang diuji yaitu kualitas sistem CoreTax (X1), literasi teknologi pengguna (X2), kepatuhan administratif (X3), dan integrasi data keuangan (X4) memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan keterbukaan informasi keuangan. Nilai Original Sample (O) pada masing-masing jalur berkisar antara 0,25 hingga 0,35, dengan nilai T-Statistics > 2,50 dan P-Value < 0,05, sehingga hubungan antar variabel dapat dianggap signifikan secara statistik pada taraf 5%(Henseler & Schuberth, 2025).

Kualitas sistem CoreTax menjadi faktor dominan dalam meningkatkan transparansi. Sistem yang andal, aman, dan mudah digunakan memungkinkan petugas LPD menginput, mengelola, dan menampilkan data keuangan secara akurat (Putri & Yadnyana, 2025) . Literasi teknologi pengguna juga berperan penting; kemampuan aparatur LPD mengoperasikan CoreTax mempengaruhi kelengkapan dan ketepatan laporan. Kepatuhan administratif mendorong disiplin pelaporan, sehingga data pajak yang disampaikan sesuai prosedur dan jadwal yang ditetapkan. Integrasi data keuangan memungkinkan sinkronisasi informasi antar sistem, mengurangi duplikasi, dan meningkatkan konsistensi laporan.

Temuan ini menegaskan bahwa implementasi platform digital seperti CoreTax tidak hanya mempermudah proses pelaporan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan LPD Desa Adat Bedha dalam pengelolaan pajak. Transparansi yang lebih tinggi mendorong kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, meminimalkan risiko kesalahan atau manipulasi data, dan mendukung tata kelola keuangan desa yang profesional serta berbasis teknologi (Cahyadi et al., 2023).

4.2 Tantangan Yang Dihadapi Dalam Pelaporan Pajak di LPD Desa Adat Bedha

Pelaporan pajak di LPD Desa Adat Bedha menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan transparansi sistem. Keterbatasan literasi teknologi pengguna menjadi kendala utama, karena sebagian aparatur LPD masih kesulitan dalam mengoperasikan platform CoreTax secara optimal, yang berpotensi menimbulkan kesalahan input data dan keterlambatan pelaporan. Infrastruktur teknologi yang belum memadai, termasuk koneksi internet yang tidak stabil dan perangkat keras terbatas, turut menghambat pengelolaan data pajak secara digital (Panjaitan & Yuna, 2024). Selain itu, kepatuhan administratif yang tidak konsisten menjadi tantangan penting, karena sebagian petugas atau wajib pajak belum sepenuhnya disiplin dalam melengkapi dokumen dan mengikuti prosedur pelaporan, sehingga data menjadi tidak seragam. Integrasi data yang terbatas antara CoreTax dengan sistem internal LPD maupun dokumen eksternal menyebabkan ketidakkonsistenan informasi dan risiko duplikasi data, menyulitkan proses verifikasi laporan. Hambatan budaya organisasi juga muncul dalam bentuk resistensi terhadap perubahan digital, di mana sebagian petugas dan masyarakat masih cenderung mempertahankan praktik manual atau semi-digital, sehingga adopsi sistem digital belum merata (Sudiana et al., 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penggunaan platform digital CoreTax berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pelaporan pajak di LPD Desa Adat Bedha. Kualitas sistem CoreTax, literasi teknologi pengguna, kepatuhan administratif, dan integrasi data keuangan berkontribusi meningkatkan keterbukaan informasi. Kualitas sistem menjadi faktor dominan, sementara kemampuan aparatur mengoperasikan teknologi, disiplin pelaporan, dan integrasi data mendukung efektivitas laporan. Tantangan masih muncul berupa keterbatasan literasi, infrastruktur, kepatuhan administratif tidak konsisten, integrasi data terbatas, dan resistensi terhadap digitalisasi. Optimalisasi sistem, peningkatan kapasitas pengguna, dan integrasi data yang baik diperlukan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap LPD.

5.2. Saran

Adapun saran dari penelitian ini antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Pengguna
Melakukan pelatihan rutin bagi aparatur LPD untuk meningkatkan literasi teknologi dan kemampuan operasional CoreTax.
2. Penguatan Kepatuhan Administratif
Mendorong disiplin pelaporan melalui SOP yang jelas, monitoring berkala, dan sistem pengingat otomatis.
3. Optimalisasi Integrasi Data
Meningkatkan sinkronisasi CoreTax dengan sistem keuangan internal dan dokumen eksternal untuk mengurangi duplikasi dan ketidakkonsistenan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, A., Amalia, N., Rahmayanti, K. P., Adani, N., Wiyono, N. H., Endawansa, A., Utami, M. G., & Yuniar, A. M. (2023). Health taxes in Indonesia: A review of policy debates on the tobacco, alcoholic beverages and sugar-sweetened beverage taxes in the media. *BMJ Global Health*, 8. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-012042>
- Audira, I. N., Firmansyah, R., & Permana, T. (2023). Memeriahkan Hajat Laut Para Nelayan Pesisir Pantai Pangandaran. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 250–253. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>
- Bashir, M. F., MA, B., Bashir, M. A., Radulescu, M., & Shahzad, U. (2022). Investigating the role of environmental taxes and regulations for renewable energy consumption: evidence from developed economies. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 35(1), 1262–1284. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1962383>
- Bhattacharjee, N. V., Schumacher, A. E., Aali, A., Abate, Y. H., Abbasgholizadeh, R., Abbasian, M., Abbasi-Kangevari, M., Abbastabar, H., ElHafeez, S. A., Abd-Elsalam, S., Abdollahi, M., Abdollahifar, M. A., Abdoun, M., Abdullahi, A., Abebe, M., Abebe, S. S., Abiodun, O., Abolhassani, H., Abolmaali, M., ... Vollset, S. E. (2024). Global fertility in 204 countries and territories, 1950–2021, with forecasts to 2100: a comprehensive demographic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *The Lancet*, 403(10440), 2057–2099. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)00550-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00550-6)
- Cahyadi, A., Hutagalung, J. I. G., & Muttaqin, Z. (2023). The urgency of reforming Indonesia's tax Law in the face of economic digitalization. In *Cogent Social Sciences* (Vol. 9, Issue 2). Cogent OA. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2285242>
- Goktas, P., & Dirsehan, T. (2025). Using PLS-SEM and XAI for causal-predictive services marketing research. *Journal of Services Marketing*, 39(1), 53–68. <https://doi.org/10.1108/JSM-10-2023-0377>
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., Sharma, P. N., & Liengard, B. D. (2024). Going beyond the untold facts in PLS–SEM and moving forward. *European Journal of Marketing*, 58(13), 81–106. <https://doi.org/10.1108/EJM-08-2023-0645>
- Henseler, J., & Schuberth, F. (2025). Should PLS become factor-based or should CB-SEM become composite-based? Both! In *European Journal of Information Systems* (Vol. 34, Issue 3, pp. 551–563). Taylor and Francis Ltd. <https://doi.org/10.1080/0960085X.2024.2357123>
- Kamil, A. S., Setyaningrum, L., Lesmana, A. C., Putri, M. S., Negara, S., Susiati, H., & Anggoro, Y. D. (2023). Regional Impact Analysis of Carbon Tax Implementation on Indonesia's Coal Power Plant with Interregional Input-output Method. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(3), 149–157. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14115>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025a). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. In *Jurnal Riset Akuntansi Politika* (Vol. 8, Issue 1). <http://jra.politika.ac.id/index.php/JRA/index>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025b). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. In *Jurnal Riset Akuntansi Politika* (Vol. 8, Issue 1). <http://jra.politika.ac.id/index.php/JRA/index>
- Kusuma, I. W. N. M., Suardi, I. D. P. O., & Putra, G. S. A. (2025). Efektivitas Instagram sebagai Media Komunikasi Pemasaran Produk Pertanian oleh Panenpa Indonesia. *Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata*, 14(1), 2685–3809. <https://doi.org/10.24843/JAA.2025.v14.i01.p16>

-
- Nainggolan, H. L., Aritonang, J., Ginting, A., Sihotang, M. R., & Gea, M. A. P. (2021). ANALISIS DAN STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN TRADISONAL DI KAWASAN PESISIR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SUMATERA UTARA. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 16(2), 237. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v16i2.9969>
- Nuryanah, S., Siregar, S. V. N. P., Arifin, I., & Sofyan, L. (2024). Taxpayers' Perceptions of a New Digital Tax Return Feature: A Case Study in Indonesia. *INTERNATIONAL JOURNAL OF EBUSINESS AND EGOVERNMENT STUDIES*, 16(1), 6–54. <https://doi.org/10.34111/ijebeq>
- Panjaitan, M. R., & Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i3.2560>
- Putri, N. K. A. M. S., & Yadnyana, I. K. (2025). THE EFFECT OF EDUCATION LEVEL, EMPLOYEE PERFORMANCE, AND PERSONAL TECHNIQUES ON THE EFFECTIVENESS OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM UTILIZATION (A Study on Village Credit Institutions in Tabanan District). *INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS (IJEFE)*, 2(2), 804–816.
- Rusmeni, N. P. D. A., Rismayanti, I. D. A., & Aryawan, I. K. Y. (2025). Effect of Core Stability Exercise on Lower Back Pain of Fish Boilers In Sentra of Kusamba's Boiling Place. *Jurnal Kesehatan Dr. Soebandi*, 13(1). <https://doi.org/10.36858/jkds.v13i1.801>
- Sari, W. P., Pandrianto, N., Azeharie, S., Sukendro, G. G., & Irena, L. (2024). The Existence of Tourism and Local Culture: A Study of the TALC Tourism Model in Bali. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(11), e09357. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n11-051>
- Sarmawa, I. W. G., Putra, I. B. U., & Tantra, I. G. L. P. (2025). PENGUATAN INTEGRITAS KEPEMIMPINAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI BALI. *Jurnal Kreativitas Dan Inovasi (Jurnal Kreanova)*, 5(1), 1–5. <https://doi.org/10.24034/kreanova.v5i1.6849>
- Subagia, I. N., Lestari, I. G. A. A. I., & Mahayasa, I. W. S. (2021). KELAYAKAN INVESTASI KREMATORIUM SANTHA GRAHA TUNON DESA ADAT BEDHA KABUPATEN TABANAN. *Jurnal Ilmiah Kurva Teknik*, 10(1), 42–48. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/jikt>
- Sudiana, I. W., Pramuki, N. M. W. A., Erlinawati, N. W. A., Pradnyawati, K. D., & Hutnaleontina, P. N. (2025). MENGUNGKAP PERAN DESA ADAT DALAM PRAKTIK TATA KELOLA LPD DI BALI. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 16(2), 240–258. <https://doi.org/10.22225/kr.16.2.2025.240-258>
- Sujarwo, W., Caneva, G., & Zuccarello, V. (2020). Patterns of plant use in religious offerings in bali (Indonesia). *Acta Botanica Brasilica*, 34(1), 40–53. <https://doi.org/10.1590/0102-33062019abb0110>